

DPR Galang Petisi Tolak Gedung Baru

Hari ini dijadwalkan rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.

JAKARTA — Lima orang anggota DPR dari lintas fraksi, Senin (4/4), menggalang petisi penolakan pembangunan gedung baru DPR. Kelima orang itu, yakni Teguh Juwarno dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Roy Suryo dari Fraksi Partai Demokrat, Budiman Sudjatmiko dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Prabowo dari Fraksi Gerindra, dan Abdul Malik Haramain dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB).

Roy Suryo menjelaskan, sejak awal secara pribadi, dia sudah tidak menyetujui pembangunan gedung baru DPR. Menurut Roy, masih banyak alasan lain yang lebih penting daripada merealisasikan pembangunan gedung baru dengan anggaran Rp 1,13 triliun itu. "Ini suara pribadi," kata Roy, kemarin.

Menurutnya, polemik pembangunan gedung baru DPR kembali mencuat karena tidak ada komunikasi dan sosialisasi yang baik dari pihak Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Solusi yang ditawarkan, lanjutnya, adalah penundaan pembangunan gedung baru. BURT DPR, kata Roy, perlu reredefinisikan ruang kerja anggota dewan. Maksudnya, perlu ada penataan ulang gedung Nusantara I untuk memastikan apakah benar DPR kekurangan ruangan.

Abdul Malik Haramain dari Fraksi PKB menambahkan, rencana pembangunan gedung baru kontraproduktif dengan DPR. Maksudnya, pembangunan gedung baru tidak mendesak apalagi dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan produktivitas. "Tidak ada relevansinya dengan kinerja dan produktivitas dengan pembangunan gedung," kata Malik.

Menurut Malik, rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi pada pekan ini akan menjadi titik akhir terakhir bagi polemik pembangunan



PETISI MENOLAK GEDUNG BARU

Anggota F-PDIP Budiman Sujatmiko (kiri), Teguh Juwarno (F-PAN), serta Abdul Malik Haramain (F-PKB/kanan) menunjukkan dokumen petisi untuk menolak rencana pembangunan gedung baru DPR, Jakarta, Senin (4/4).

gedung baru DPR. "Kalau tidak tahu keputusannya apa, kita hentikan di rapat paripurna," ancam Malik.

Berbeda dengan penggagas petisi penolakan gedung baru DPR, anggota Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasih menilai beberapa anggota dewan yang menolak pembangunan gedung baru sebagai aksi cari muka. Menurut Achsanul, penolakan seharusnya lewat forum resmi, yakni rapat Paripurna DPR. "Tapi, selama tiga sampai empat kali paripurna dilakukan tidak ada satu pun yang mengatakan tidak setuju," kata Achsanul.

Achsanul menerangkan, sejak awal semua fraksi di DPR menyetujui pembangunan gedung baru. Namun bela-

kangan, dengan alasan tekanan publik, beberapa fraksi mulai mengambil langkah berbeda. "Ini tidak fair, ada pembohongan partai untuk mencitrakan mereka membela rakyat," katanya.

Menurut Achsanul, pembatalan pembangunan gedung baru hanya bisa dilakukan dengan mengubah rencana strategis (renstra) DPR 2010-2014. Apalagi, anggaran Rp 1,13 triliun untuk membangun gedung baru telah disetujui pemerintah dan DPR untuk dianggarkan dalam APBN.

Berbicara terpisah, Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifudin, meminta Ketua DPR Marzuki Alie berhati-hati mengeluarkan tuduhan, terkait rencana pembangunan gedung baru DPR. Pem-

angunan gedung baru DPR, kata Lukman, belum pernah disetujui DPR periode lalu (2004-2009). "Sebaiknya Marzuki Alie hati-hati mengeluarkan tuduhan bahwa rencana gedung baru sudah disetujui DPR periode 2004-2009," kata Lukman lewat pesan singkat.

Mantan wakil ketua Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR periode lalu ini mengatakan yang sudah disetujui oleh DPR periode 2004-2009 adalah *grand design* kompleks parlemen RI. "Bukan gedung baru DPR," kata Lukman. Persepsi desain itu pun mensyaratkan adanya sayembara.

Menurut Lukman, sebaiknya Marzuki membuka dokumen yang menyatakan telah ada persetujuan DPR periode lalu

untuk pembangunan gedung baru DPR. Jangan-jangan, tambah dia, ada informasi yang 'dibelokkan' dan Marzuki tak mengetahuinya. "Tunjukkan kapan rapat paripurna DPR periode lalu yang memutuskan hal itu," kata Lukman.

Marzuki tak risau

Marzuki Alie kepada wartawan kemarin menyatakan tidak terlalu merisaukan ancaman somasi atas rencana pembangunan gedung baru DPR. Marzuki menilai somasi itu salah alamat. "Kita tidak lihat somasinya, kita hanya melihat apa yang dilakukan oleh lembaga ini (DPR)," kata Marzuki, kemarin.

Menurutnya, DPR sebagai sebuah lembaga negara memiliki aturan berupa undang-undang dalam melakukan setiap kegiatannya. Kalau somasi itu berkaitan dengan pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh DPR, pihaknya bisa menerima somasi itu dan siap untuk memperbaikinya. Namun, kata Marzuki, dalam pembangunan gedung baru itu DPR telah melakukan proses sesuai dengan aturan hukum. "Tapi, kita biasalah digugat atau disomasi seperti itu, namanya juga lembaga negara," ujar Marzuki.

Marzuki menilai, tidak ada yang salah dalam rencana pembangunan gedung baru DPR itu. Alasannya, semua prosedur telah berjalan sesuai dengan aturan. Keperluan-keperluan DPR dibicarakan di BURT DPR. Di BURT itu, terangnya, terdapat seluruh perwakilan fraksi yang telah menyetujui pembangunan gedung baru.

Marzuki memastikan, pimpinan DPR akan melakukan konsultasi dengan pimpinan fraksi pada Selasa (5/4) ini, terkait rencana pembangunan gedung baru itu. Kalau ternyata ada fraksi-fraksi yang berubah dengan tidak menyetujui rencana itu, masalah tersebut akan dibawa ke sidang Paripurna DPR. "Ya, nanti apa pun keputusan sidang paripurna saya akan turuti, termasuk jika keputusannya membatalkan rencana pembangunan gedung tersebut."

■ esthi maharani/palupi annisa auliani/muhammad hafli ed: andri saubani

Pemerintah Ajukan Banding Kasus Sumiati

JAKARTA — Pemerintah menyatakan banding atas putusan ulang pengadilan tingkat pertama Madinah, Arab Saudi, pada Sabtu (2/4), atas kasus penganiayaan warga negara Indonesia (WNI) sebagai tenaga kerja (TKI), Sumiati. Penolakan atas putusan itu disampaikan pemerintah melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.

Putusan pengadilan tingkat I Madinah menyatakan membebaskan kewajiban membayar hak khusus berupa denda atas perbuatan penganiayaan atas TKI asal Dompus (Nusa Tenggara Barat-NTB) itu yang dilakukan oleh majikannya. "KJRI di Jeddah menolak keputusan hakim itu dan akan banding," kata Julian mengutip laporan Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Gatot Mansyur, kepada Presiden, Senin (4/4).

Dari laporan Kantor Berita Antara, pembebasan hak khusus itu terjadi karena menurut hakim tidak terbukti ada luka-luka baru dari penganiayaan. Proses hukumnya kemudian dilanjutkan dengan pengadilan di tingkat I untuk hak umum, yaitu hukuman kriminalnya.

Julian menambahkan, bila putusan pengadilan tingkat I untuk hak umum juga mengecewakan, akan diajukan permintaan banding. "Belum lagi pengadilan tingkat kasasi. Jadi, insya Allah, masih ada peluang untuk membela Sumiati di

tingkat banding dan kasasi."

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) M Jumhur Hidayat juga menyayangkan putusan pengadilan tersebut. "Sama sekali tidak adil," katanya di Jakarta, Senin.

Kasus Sumiati binti Salan Mustafa (23 tahun) terkuak pada 8 November 2010 setelah TKI ini dilarikan ke rumah sakit King Fahd. Sekujur tubuhnya terluka parah. Diduga, Sumiati disiksa oleh istri majikannya, Khalid Salem M al-Khamimisinger.

Sepekan setelah kasus tersebut mencuat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar kasus Sumiati ditangani secara serius untuk memastikan proses hukum ditegakkan. Untuk itu, Presiden mengirim Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menneg PP dan PA) Linda Amalia Sari Gumelar serta tim khusus ke Arab Saudi untuk melindungi dan membela hak Sumiati.

Pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Madinah, Januari 2011 lalu, majikan Sumiati dijatuhi hukuman tiga tahun. Namun, Mahkamah Banding di Makkah pada Selasa (15/3) mengeluarkan keputusan pengulangan untuk persidangan tingkat pertama. Sebab, ada hak pribadi yang belum dilakukannya dalam pengadilan di

tingkat pertama.

Persidangan ulang yang digelar Sabtu (2/4) justru membebaskan penganiayaan Sumiati karena tidak ada bukti bahwa dia telah menyiksa Sumiati. Istri majikan membantah melakukan penyiksaan tersebut dan menyatakan bahwa Sumiati menyiksa dirinya sendiri.

Jumhur mendukung upaya pengacara Sumiati yang menyatakan banding atas putusan pengadilan tersebut. "Tak ada jalan lain. Bawa ke tingkat yang lebih tinggi," katanya. Ia berharap pengadilan di tingkat banding dapat melihat keadilan secara objektif disertai fakta-fakta yang ada.

Sebelumnya, Jumhur menyampaikan bahwa Pemerintah Arab Saudi menyekalkan atas terulangnya kembali penganiayaan terhadap TKI di sana.

"Pemerintah Saudi juga menyekalkan dan mengutuk serta berempati ke kita." Pemerintah pun segera mengirim nota protes kepada Arab Saudi atas kasus pembunuhan.

Kasus ini terjadi atas Aan Darwati binti Udin Encup, TKI asal Majalengka, Jawa Barat, yang tiba di Jeddah pada 6 Juni 2010. Dia disiksa dan dibunuh di toilet rumah di Makkah, Arab Saudi, Rabu (30/3), oleh majikannya Hamud Mhd Barkah Al Utaibi. Kepolisian wilayah Al Manshor Kota Makkah telah menahan Hamud.

■ antara ed: dewi mardiani

PERINGATAN TSUNAMI

Ribuan warga memadati jalan untuk kembali ke rumah masing-masing menyusul peringatan tsunami yang dibatalkan oleh pihak berwenang akan potensi tsunami akibat terjadinya gempa berkekuatan 6,7 skala richter di 293 km barat daya Cilacap, Jawa Tengah, Senin (4/4).



Kontrak Baru Koalisi Perbarui Kode Etik di Setgab

JAKARTA — Koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintah dikabarkan baru saja menandatangani kontrak baru koalisi. Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq membenarkan perkembangan terbaru koalisi itu. "Ada pembaruan kontrak politik koalisi, terutama terkait kode etik koalisi," ujar Mahfudz, di Jakarta, Senin (4/4).

Mahfudz menerangkan, pembaruan kode etik koalisi masih bersifat sementara lantaran baru berupa draf yang belum disepakati. Dia menambahkan, draf itu baru diajukan oleh satu pihak, tetapi dia tidak mengetahui secara pasti siapa pihak yang mengajukan.

Mahfudz mengharapkan pembaruan kontrak koalisi dirumuskan dan disetujui bersama oleh parpol peserta koalisi. PKS saat ini dalam posisi menunggu inisiatif baik dari Sekretariat Ga-

bangun Partai Koalisi (Setgab) atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk duduk bersama membahas pembaruan kontrak koalisi. Ditanya jika ke depannya PKS tidak lagi berada dalam koalisi, Mahfudz menjawab, "Kami tidak keberatan, PKS akan mengurus urusan lain saja," kata Mahfudz.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasih menegaskan, kontrak koalisi partai masih belum berubah. Achsanul juga menyatakan, sampai saat ini belum ada evaluasi atas koalisi parpol pendukung pemerintah. "Koalisi masih ada enam partai dan tidak berkurang," katanya, Senin (4/4).

Senada dengan Achsanul, Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah menyatakan, pembaruan kontrak koalisi partai dalam Setgab masih menunggu pertemuan antara PKS dan SBY. Jafar menampik informasi soal adanya draf kontrak baru

koalisi yang sedang dibahas dalam Setgab.

Jafar hanya memastikan pertemuan antara PKS dan SBY akan membahas masa depan koalisi parpol yang tergabung dalam Setgab. "Partai lain juga akan menemu-mui Bapak (Presiden SBY), tapi satu per satu," tambahnya.

Meski meredup gemanya, kisruh koalisi memang masih menyisakan pekerjaan rumah. Salah satunya adalah janji pertemuan SBY dengan PKS terkait evaluasi koalisi dan wacana pembaruan kontrak politik. PKS hingga kini terus menunggu kepastian pertemuan yang diperkirakan akan menentukan keberadaan PKS di Setgab.

"Sikap PKS masih akan menunggu realisasi pertemuan dan pembicaraan Ketua Majelis Syuro PKS (Hilmi Aminudin—Red) dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (SBY—Red)," kata Presiden PKS

Luthfi Hasan Ishaq, Jumat (1/4), pekan lalu.

Menurut Luthfi, pertemuan kedua petinggi partai itu akan menjadi penentu sikap politik yang akan diambil PKS. Karena kebijakan—termasuk soal koalisi—di PKS diputuskan oleh Hilmi, ujar Luthfi, setelah dibahas bersama Majelis Syuro PKS. Dengan demikian, tambahnya, wacana pembaruan kontrak politik dalam dokumen kode etik koalisi baru akan mendapat 'pintu masuk' jika pertemuan ini terealisasi.

Sekjen PKS Anis Matta menambahkan, PKS tidak gentar dengan ancaman digusurnya PKS dari koalisi ataupun kabinet. Namun, kata Anis, selama belum ada pernyataan resmi dari SBY, PKS tidak akan mendahului langkah. "Baru akan kami anggap kalau yang bicara adalah SBY sendiri," tegas Anis. ■ esthi maharani/ditto pappilanda/palupi annisa auliani ed: andri saubani